

**RENCANA KERJA**  
(RENJA)  
**INSPEKTORAT**  
**KABUPATEN CIANJUR**  
**TAHUN 2018**



**KATA PENGANTAR**

Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2018 telah selesai disusun yang merupakan amanat undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Pasal 21 ayat 3 menyebutkan bahwa : “Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4)”.

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Cianjur merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Renstra Inspektorat Kabupaten Cianjur dalam aspek perencanaan pembangunan daerah, yang memuat Kebijakan, Program-Program dan Kegiatan indikatif Inspektorat Kabupaten Cianjur selama kurun waktu satu tahun sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat.

Tersusunnya Rencana Kerja ini tidak terlepas dari partisipasi semua pihak yang ada di Inspektorat Kabupaten Cianjur, besar harapan kami agar RENJA ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Kabupaten Cianjur dan yang memerlukannya, untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan serta selalu dalam lindungan Allah SWT, aamiin.

Cianjur, Juli 2017

**INSPEKTUR,**

**H. AGUS INDRA SE MM**

NIP :19591114 198503 1 016

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	2
1.4. Sistematika Penulisan .....	3
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN CIANJUR TAHUN LALU</b> .....	4
2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Cianjur tahun lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Cianjur .....	4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Cianjur .....	6
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Cianjur .....	8
2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD .....	8
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	10
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b> .....	11
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	11
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Cianjur .....	12
3.3. Program dan Kegiatan .....	12
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	14

---

**DAFTAR TABEL**

<b>2.1.</b>	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Penapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2018 (Tahun Berjalan).....	5
<b>2.2.</b>	Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 .....	6
<b>2.3.</b>	Pencapaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Cianjur .....	7
<b>2.4.</b>	Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 .....	9
<b>3.1.</b>	Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Daerah .....	11
<b>3.2.</b>	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 .....	13



---

# BAB 1

---

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan RENJA berpedoman pada renstra Inspektorat Kabupaten Cianjur dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Inspektorat Daerah merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 23 tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA).

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2018 memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang dilengkapi dengan dana indikatif serta sumber dananya.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang melatarbelakangi penyusunan renja Inspektorat Kabupaten Cianjur tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Dilingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005, Tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Cianjur.

## 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2018, bertujuan untuk menunjukkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dari berbagai kegiatan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah.

Rencana Kerja disusun sebagai pedoman bagi :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Inspektorat;
2. Penyusunan kebijakan anggaran, program dan kegiatan Tahun 2018.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

RENJA Inspektorat Kabupaten Cianjur tahun 2018 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT PADA TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Cianjur
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Cianjur
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Cianjur
- 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Cianjur
- 3.3. Program dan Kegiatan

##### **BAB VI PENUTUP**



---

**BAB 2**

---

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT  
KABUPATEN CIANJUR TAHUN LALU****2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN CIANJUR TAHUN LALU  
DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN CIANJUR**

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Indikator Masukan (*Input*), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- b. Indikator Keluaran (*Output*), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- c. Indikator Hasil (*Outcome*), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2018 (Tahun Berjalan)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Target Kinerja Cpaian Program (RENSTRA) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog/Keg s/d Tahun 2015	Target dan Realiasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu			Target Prog Keg (Renja PD Tahun 2016)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun Berjalan	
						Target RENJA Tahun 2017	Realisasi RENJA Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog/Keg s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>										
4.02	<b>Pengawasan</b>										
4.02.01	<b>INSPEKTORAT</b>										
..... 15	<b>Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	1. Persentase Peningkatan Maturitas SPIP di setiap OPD	%	20%		20%	2%	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%
		2. Persentase Penurunan Temuan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	%	5%		8%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		3. Persentase Peningkatan Tindak Lanjut Temuan/ Rekomendasi BPK	%	5%		8%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4. Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Instansi	%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
15.01	Pelaksanaan Pengawasan Internal	1. Jumlah PD yang dilakukan pengawasan internal	PD	58 PD		58 PD	26 PD	44,83%	36 PD	62 PD	100%
		2. Jumlah Pemerintah Desa yang diperiksa Laporan Keuangannya	Desa	160 Desa		100 Desa	90 Desa	90,00%	348 Ds	438 Desa	136,88%
		3. Jumlah Kasus yang diperiksa	Kasus	8 Kasus		8 Kasus	4 Kasus	50,00%	37 Kasus	41 Kasus	256,26%
		4. Jumlah Kegiatan Reviu yang dilaksanakan	Reviu	3 Reviu		3 Reviu	2 Reviu	33,33%	3 Reviu	4 Reviu	83,33%
15.02	Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	Penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP Kabupaten/ Provinsi, Itjen Kementerian, BPKP dan BPK	Rekomendasi	125 Rekomendasi		125 Rekomendasi	234 Rekomendasi	187,20%	674 Rekomendasi	904 Rekomendasi	361,60%
15.03	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Pengaduan Masyarakat yang ditangani	%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
15.05	Penguatan Pengawasan di Kabupaten/Kota	Jumlah PD yang menerapkan SPIP di lingkungan Kerjanya	PD	26 PD		26 PD	26 PD	100%	26 PD	26 PD	100%

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA INSPEKTORAT Tahun 2017 hingga triwulan I disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran adalah :
  - Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dalam hal indikator kinerja pada poin 2 dan 3 dengan penjelasan :
    - Poin 2 => Penurunan temuan dan rekomendasi BPK hingga triwulan I belum dapat dihitung karena hingga Bulan Mei 2017 masih dalam tahap pemeriksaan oleh BPK.
    - Poin 3 => Persentase peningkatan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK hingga semester I masih belum ada kemajuan.
  - Kegiatan pada Pelaksanaan Pengawasan Internal dalam hal jumlah reviu yang dilaksanakan yaitu hingga Bulan Mei 2017 baru dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan reviu.
- b. Program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran adalah :
  - Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dalam hal indikator kinerja pada poin 1 dan 4.
  - Kegiatan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan, Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Penguatan Pengawasan di Kabupaten/Kota.
- c. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN CIANJUR adalah terdapat kegiatan dalam program renstra yang masih belum terpenuhi.

## 2.2 ANALISIS KINERJA PALAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN CIANJUR

Sesuai dengan dokmen RENSTRA Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 yang telah disusun maka hubungan antara tujuan, sasaran, serta indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Indikator sasaran				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan yang bersih dan efektif	Terwujudnya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian urusan pemerintahan daerah	Persentase peningkatan maturitas SPIP di setiap PD	20%	20%	20%	20%	20%
		Persentase penurunan temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	10%	8%	7%	6%	5%
		Persentase peningkatan tindak lanjut temuan/ rekomendasi BPK	10%	8%	7%	6%	5%
		Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat dan instansi	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Cianjur sesuai dengan RENSTRA INSPEKTORAT tertuang dalam capaian Sasaran Strategis Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja INSPEKTORAT KABUPATEN CIANJUR

No	Indikator	Target RENSTRA					Realisasi Capaian (2017)	Proyeksi		Catatan Analisis
		2017	2018	2019	2020	2021		2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Persentase peningkatan maturitas SPIP di setiap PD	20%	20%	20%	20%	20%	5%	20%	20%	
2.	Persentase penurunan temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	10%	8%	7%	6%	5%	0%	8%	7%	
3.	Persentase peningkatan tindak lanjut temuan/rekomendasi BPK	10%	8%	7%	6%	5%	12,04%	8%	7%	
4.	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat dan instansi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan indikator sasaran organisasi, yaitu :

a. Faktor Pendorong :

- Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Cianjur yang telah sesuai dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 57 Tahun 2016, sehingga menjadi lebih ramping dan kaya fungsi dengan diisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- Mekanisme kerja Inspektorat Kabupaten Cianjur yang berorientasi kepada pencapaian kinerja.
- Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Inspektorat Kabupaten Cianjur dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.
- Adanya kerjasama yang baik dari perangkat daerah terhadap upaya peningkatan kualitas hasil pengawasan.
- Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.

b. Faktor Penghambat :

- Belum memadainya jumlah aparaturnya pengawasan dibandingkan dengan jumlah objek (Perangkat daerah, Desa & Kelurahan, objek lainnya) yang diperiksa.
- Belum memadainya jumlah aparaturnya pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan.
- Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.
- Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan Perangkat Daerah masih belum optimal.
- Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan.

### 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN CIANJUR

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kabupahten Cianjur tidak dapat lepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis dimaksud antara lain :

1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan wajib menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur secara keseluruhan belum terlaksana dengan baik (Nilai SAKIP Pemerintah Tahun 2016 = CC).
3. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI maupun APIP masih berjalan lamban dan belum menunjukkan progres yang menggembirakan.
4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum dapat dilaksanakan dengan optimal dan terkoordinasi dengan mengedepankan peran sebagai *quality assurance* (menjamin kualitas dari suatu instansi) bukan mencari kesalahan.

### 2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Hasil reviu terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan Tahun 2018, dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

RANCANGAN AWAL RKPD						CATATAN PENTING
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
..... 15	<b>Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>					
15.01	Pelaksanaan Pengawasan Internal	Cianjur	1. Jumlah PD yang dilakukan pengawasan internal	58 PD	4.400.000	
			2. Jumlah Pemerintah Desa yang diperiksa Keuangannya	100 Desa		
			3. Jumlah Kasus yang diperiksa	8 Kasus		
			4. Jumlah Kegiatan Reviu yang dilaksanakan	3 Reviu		
15.02	Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	Cianjur	Penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP Kabupaten/ Provinsi, Itjen Kementerian, BPKP dan BPK	125 Rekomendasi	500.000	
15.03	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Cianjur	Pengaduan Masyarakat yang ditangani	100%	500.000	
15.05	Penguatan Pengawasan di Kabupaten/Kota	Cianjur	Jumlah PD yang menerapkan SPIP di lingkungan Kerjanya	26 PD	450.000	
ANALISA HASIL KEBUTUHAN						
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
..... 15	<b>Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>					
15.01	Pelaksanaan Pengawasan Internal	Cianjur	1. Jumlah PD yang dilakukan pengawasan internal	58 PD	3.155.000.000	
			2. Jumlah Pemerintah Desa yang diperiksa Keuangannya	100 Desa		
			3. Jumlah Kasus yang diperiksa	8 Kasus		
			4. Jumlah Kegiatan Reviu yang dilaksanakan	3 Reviu		
15.02	Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	Cianjur	Penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP Kabupaten/ Provinsi, Itjen Kementerian, BPKP dan BPK	674 Rekomendasi	547.665.000	
15.03	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Cianjur	Pengaduan Masyarakat yang ditangani	100%	62.000.000	
15.05	Penguatan Pengawasan di Kabupaten/Kota	Cianjur	Jumlah PD yang menerapkan SPIP di lingkungan Kerjanya	26 PD	42.000.000	

## 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat diutamakan yang merupakan usulan-usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat Kabupaten Cianjur.

Khusus untuk bidang pengawasan, usulan-usulan tersebut tidak dimunculkan/tidak ada dan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2018

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>TIDAK ADA USULAN</b>					

**BAB 3****TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN****3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2018 berada pada tahap jangka menengah yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan Visi MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, MAKMUR, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG.

Dalam rangka mensinergikan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah Kabupaten Cianjur, maka berdasarkan Rancangan Awal RKP Tahun 2018 dan RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2018 dapat disusun hubungan antara Kebijakan Pembangunan Nasional dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 3.1. Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah
1.	Ekonomi	
2.	Lingkungan	
3.	Politik	
4.	Hukum	



5.	Pertahanan dan Keamanan	
6.	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan : a. Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. b. Meningkatnya penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik
7.	Kesejahteraan Rakyat	
8.	Kewilayahan	
9.	Kelautan	

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi INSPEKTORAT Kabupaten Cianjur maka Prioritas Nasional yang berkaitan langsung adalah pada **Prioritas ke-6** yaitu **Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi**.

### 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN CIANJUR

Hubungan yang selaras antara RENJA dan RENSTRA, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2018 merupakan tujuan dan sasaran RENSTRA INSPEKTORAT tahun 2016-2021, yaitu :

#### a. Tujuan

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan yang bersih dan efektif.

#### b. Sasaran

Terwujudnya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian urusan pemerintahan daerah.

Bila dibandingkan dengan pencapaian sasaran RENSTRA tahun 2017, maka tujuan dan sasaran tersebut tetap relevan dan layak karena merupakan cerminan dari tugas pokok dan fungsi INSPEKTORAT Kabupaten Cianjur sebagai **Quality Assurance** dan **Consulting** bagi Bupati Kabupaten Cianjur terhadap pelaksanaan anggaran di Kabupaten Cianjur.

### 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan yang mendukungnya. Indikator kinerja program/kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk

menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek-aspek yang relevan. Sehingga ditentukan indikator kinerja program/kegiatan Inspektorat Kabupaten Cianjur berdasarkan kelompok tujuan dan sasaran sebagai berikut :

**Sasaran : Terwujudnya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian urusan pemerintahan daerah.**

Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan kegiatan INSPEKTORAT Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Rencana Tahun 2018		Sumber Dana (Rp.000,00)				Prakiraan Maju Tahun 2019		
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	APBD Kab.	APBD Prov.	APBN/PHLN	Sumber Dana Lainnya	TOTAL	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
<b>INSPEKTORAT KABUPATEN CIANJUR</b>														
<b>Urusan Wajib</b>														
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1. Persentase peningkatan maturitas SPP di setiap PD 2. Persentase penurunan temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK 3. Persentase peningkatan tindak lanjut temuan/rekomendasi BPK 4. Persentase penyelesaian penguaduan instansi dan masyarakat	7			20%	292.000.000,00	42.000	250.000			292.000	20%	450.000.000,00
						7%	3.155.195.000,00	3.155.195	0			3.155.195	7%	4.400.000.000,00
						7%	547.665.000,00	547.665	0			547.665	7%	500.000.000,00
						100%	62.000.000,00	62.000	0			62.000	100%	400.000.000,00
<b>Kegiatan</b>														
	Pelaksanaan Pengawasan Internal	1. Jumlah Peringkat Daerah yang dilakukan pengawasan internal 2. Jumlah Pemerintah Desa yang diperiksa laporan keuangannya 3. Jumlah kasus yang diperiksa 4. Jumlah kegiatan reviu yang dilaksanakan	7	7.b.	Kab. Cianjur	58 PD 120 Desa 8 Kasus 3 Reviu	3.155.195.000,00	3.155.195	0	0	0	3.155.195	58 PD 120 Desa 8 Kasus 3 Reviu	4.400.000.000,00
	Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan	Penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan APJP Kabupaten/Provinsi, Itjen Kementerian, BPP dan BPK	7	7.b.	Kab. Cianjur	400 Rekom	547.665.000,00	547.665	0	0	0	547.665	400 Rekom	500.000.000,00
	Penanganan Penguaduan Masyarakat	Penguaduan masyarakat yang ditangani	7	7.b.	Kab. Cianjur	100% Penguaduan	62.000.000,00	62.000	0	0	0	62.000	100% Penguaduan	400.000.000,00
	Penguatan Pengawasan Kabupaten/Kota	Jumlah Peringkat Daerah yang menerapkan SPP di Lingkungan kerjanya	7	7.b.	Kab. Cianjur	26 PD	292.000.000,00	42.000	250.000	0	0	292.000	26 PD	450.000.000,00
<b>Total Anggaran Tahun Anggaran 2018</b>							<b>4.056.860.000,00</b>	<b>3.806.860</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.056.860</b>		<b>5.750.000.000,00</b>

---

## BAB 4

---

# PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Inspektorat Tahun Anggaran 2018 merupakan sebuah gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan guna merealisasikan tujuan dan sasaran Inspektorat dengan memperhatikan kemampuan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cianjur maupun dari APBD Provinsi Jawa Barat.

Seluruh program dan kegiatan yang di rencanakan diharapkan akan bisa menutupi seluruh kebutuhan program pengawasan dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Cianjur dan RKPD Provinsi Jawa Barat yang di sesuaikan juga dengan pagu anggaran yang di terima Inspektorat.

Alokasi Anggaran indikatif pada tahun 2018 yang di peruntukan untuk membiayai seluruh kegiatan dan program kerja dikelompokkan dalam **Belanja Langsung Non Urusan** sebesar Rp590.000.000,00 serta **Belanja Langsung Urusan Wajib** sebesar Rp3.806.860.000,00 yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan Inspektorat. Dengan demikian total anggaran seluruhnya untuk **Belanja Langsung** sebesar Rp4.396.860.000,00

Sebagai input bagi para pemangku kebijakan dalam hal pengalokasian anggaran pemerintah daerah bahwa dalam rangka peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan daerah, masing-masing pemerintah daerah agar mengalokasikan minimal 1 % dari APBD dan meningkat setiap tahunnya secara proporsional untuk anggaran Inspektorat Kabupaten/Kota dan Provinsi. Hal ini sejalan dengan **surat Menteri dalam Negeri Nomor 900/2900/SJ**, disamping itu juga perlu diantisipasi dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Desa yang salah satu implementasinya akan ada bantuan keuangan untuk setiap desa yang nilainya cukup besar, dan ini memerlukan kontrol, agar penyimpangan, penyelewengan, dapat di minimalisir sehingga tujuan mewujudkan pemerintah yang bersih dapat tercapai untuk berbagai level pemerintahan .

Dengan demikian besar harapan kami agar alokasi anggaran untuk Inspektorat Kabupaten Cianjur mendapat prioritas dalam kebijakan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi implementasi program peningkatan pengawasan Akuntabilitas Aparatur Negara sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam hal penyelenggaraan pengawasan/audit atas instansi pemerintahan dan aparatur pemerintah, selain itu alokasi anggaran yang di terima akan di prioritaskan untuk meningkatkan kapasitas tenaga pengawas dan pemeriksa agar kualitas pengawasan serta penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan/audit mengalami peningkatan.

Cianjur, Juli 2017  
INSPEKTUR,

**H. AGUS INDRA, SE MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591114 198503 1 016